

**Peran Pemerintah Daerah Dalam Meningkatkan Indeks Pembangunan Manusia
Pasca Pemberian Dana Otonomi Khusus Di Kota Jayapura Provinsi Papua**

Leebreg Januarius Jappen

NPP. 29.1780

Asdaf Kota Jayapura, Provinsi Papua

Program Studi Administrasi Pemerintahan Daerah

Email: leebregjappen@gmail.com

ABSTRACT

Problems / Background (GAP): There are still many Papuan people, especially indigenous Papuans whose welfare levels are still low, both seen from economic welfare (income levels or purchasing power capabilities) and social welfare (education, health and nutrition, etc.) where the Indigenous Papuan community still has low income, does not have Adequate education, and low-degree health and nutrition so that the reality can indicate that special autonomy policies for provinces in Papua are not yet fully effective in order to improve the welfare of indigenous Papuans. **Purpose:** The purpose of writing this thesis is to find out and analyze the role of the local government in increasing the human development index after the provision of special autonomy funds in the city of Jayapura, Papua Province, to find out and analyze the supporting factors and inhibitors the role of the regional government in increasing the human development index after the provision of special autonomy funds in the city of Jayapura The Papua Province, to find out and analyze efforts to overcome the inhibiting factors of the role of the regional government in increasing the human development index after the provision of special autonomy funds in the city of Jayapura in Papua Province. **Methods:** The research method used is a descriptive qualitative method with an inductive approach. Data collection techniques through interviews, observations, and documentation. The theory used in this study is Soekanto's theory (2015: 210) includes two things, namely regarding rights and obligations. **Results / Findings:** The results showed that the role of the regional government in increasing the human development index after the provision of special autonomy funds in the city of Jayapura Province of Papua showed that the special authority received by the Jayapura City Government and the purpose of providing special autonomy funds, namely in order to increase the human development index in Jayapura City, seems to have not been achieved In addition, officials as officials as special authority holders have not used it intelligently and optimally in each level of government structures so that the achievement of the increase in the Jayapura City Human Development Index itself. **Conclusion:** That the role of Bappeda as the extension of the government has gone well in carrying out duties and responsibilities and in realizing the arrangement of regional development planning, in order to realize improving the human development index in Jayapura City based on Law Number 21 of 2001, namely the provision of special autonomy funds for the province of Papua In the welfare of the Papuan society especially in the city of Jayapura, although in the process of implementation

there are several obstacles caused by health, the lack of international standards of superior schools and social factors in this case photographing the people of Jayapura City.

Keywords: Role, BAPPEDA, Human Development Index, Special Autonomy (Law Number 21 of 2001).

ABSTRAK

Permasalahan/Latar Belakang (GAP): Masih banyak masyarakat Papua terutama penduduk asli Papua yang tingkat kesejahteraan mereka masih rendah baik dilihat dari kesejahteraan ekonomi (tingkat pendapatan atau kemampuan daya beli) maupun kesejahteraan sosial (pendidikan, kesehatan dan gizi, dan lain-lain) dimana masyarakat asli Papua masih punya pendapatan yang rendah, tidak memiliki pendidikan yang memadai, dan derajat kesehatan dan gizi rendah sehingga kenyataan tersebut dapat mengindikasikan bahwa kebijakan otonomi khusus bagi Provinsi di Papua belum sepenuhnya efektif dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat asli Papua. **Tujuan:** Tujuan Penulisan skripsi ini adalah untuk Mengetahui dan menganalisis peran Pemerintah Daerah dalam meningkatkan Indeks Pembangunan Manusia pasca pemberian dana otonomi khusus di kota Jayapura Provinsi Papua, untuk Mengetahui dan menganalisis faktor-faktor pendukung dan penghambat peran Pemerintah Daerah dalam meningkatkan Indeks Pembangunan Manusia pasca pemberian dana otonomi khusus di Kota Jayapura provinsi papua, untuk Mengetahui dan menganalisis upaya mengatasi faktor-faktor penghambat peran Pemerintah Daerah dalam meningkatkan Indeks Pembangunan Manusia pasca pemberian dana otonomi khusus di Kota Jayapura Provinsi Papua.

Metode: Metode penelitian yang digunakan adalah metode kualitatif deskriptif dengan pendekatan induktif. Teknik pengumpulan data melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi. Teori yang digunakan dalam penelitian ini adalah teori Soekanto (2015:210) meliputi dua hal yaitu mengenai hak dan kewajiban. **Hasil/ Temuan:** Hasil penelitian menunjukkan bahwa peran pemerintah daerah dalam meningkatkan indeks pembangunan manusia paska pemberian dana otonomi khusus di Kota Jayapura Provinsi Papua menunjukkan bahwa kewenangan khusus yang diterima oleh pemerintah Kota Jayapura setara tujuan pemberian dana otonomi khusus yaitu dalam rangka meningkatkan indeks pembangunan manusia di Kota Jayapura, tampaknya belum tercapai secara optimal selain itu para pejabat sebagai pemegang kewenangan khusus belum memanfaatkannya secara cerdas dan optimal disetiap jenjang struktur pemerintahan sehingga menghambat pencapaian peningkatan indeks pembangunan manusia Kota Jayapura itu sendiri. **Kesimpulan:** bahwa peran Bappeda selaku perpanjangan tangan dari Pemerintah sudah berjalan dengan baik dalam melaksanakan tugas dan tanggung serta dalam mewujudkan susunan Perencanaan Pembangunan Daerah, dalam rangka mewujudkan meningkatkan Indeks Pembangunan Manusia di Kota Jayapura berdasarkan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 yaitu Pemeberian Dana Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua dalam Mensejahterakan masyarakat Papua terkhususnya di Kota Jayapura, meskipun dalam proses pelaksanaannya terdapat beberapa kendala yang disebabkan oleh kesehatan, kurangnya sekolah unggulan yang berstandar internasional dan faktor sosial dalam hal ini memotifasi masyarakat Kota Jayapura.

Kata kunci : Peran, Bappeda ,Indeks Pembangunan Manusia , Otonomi Khusus (UU Nomor 21 Tahun 2001).

I. PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Sistem Pemerintahan Negara Indonesia menerapkan sistem desentralisasi dimana pemerintah pusat memeberikan tanggung jawab dan kewenangan kepada pemerintah daerah untuk menyelenggarakan pemerintahan di daerahnya secara mandiri. Indonesia terdiri dari beberapa wilayah. sistem pemerintahan yang diterapkan di Indonesia adalah sistem desentralisasi yaitu sejak diberlakukannya desentralisasi, pemerintahan daerah memiliki kesempatan untuk menerapkan upaya-upaya sendiri dalam rangka memperbaiki serta meningkatkan wilayah yang dipimpinnya. Desentralisasi juga dapat diuraikan sebagai suatu pengakuan atau penyerahan wewenang dari badan-badan umum yang lebih tinggi kepada badan-badan umum untuk secara mandiri dan berdasarkan pertimbangan kepentingan sendiri dalam mengambil keputusan pengaturan dan pemerintahan.

Perlu kita ketahui disini bahwa terbentuknya otonomi khusus bagi Provinsi Papua tidak terlepas dari sejarah. Pada tanggal 1 Mei tahun 1963 semenjak terintegrasi kembali beberapa kekhususan yang harus diperhatikan oleh pemerintah pusat kepada pemerintah daerah. Otonomi khusus lahir melalui Undang-Undang No 21 tahun 2001 dimana Papua diberikan keistimewaan atau kekhususan dari pemerintah pusat kepada pemerintah Provinsi Papua dalam memilih pemimpin, mengatur daerahnya termasuk diberikan anggaran untuk membangun dan membawa perubahan bagi masa depan masyarakat Papua sendiri. Berbagai kebijakan dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan yang sentralistik belum sepenuhnya memenuhi rasa keadilan, belum memungkinkan tercapainya kesejahteraan rakyat, belum mendukung terwujudnya penegakan hukum, dan belum sepenuhnya masyarakat Papua. Kondisi tersebut mengakibatkan terjadinya kesenjangan pada hampir semua sektor kehidupan, terutama dalam bidang pendidikan, kesehatan, ekonomi, kebudayaan, dan sosial-politik serta birokrasi pemerintahan pada berbagai level.

Pelanggaran HAM, pengabaian hak-hak dasar penduduk asli dan adanya perbedaan pendapat mengenai sejarah penyatuan Papua ke dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia adalah masalah-masalah yang perlu diselesaikan. Upaya penyelesaian masalah tersebut selama ini dinilai

kurang menyentuh akar masalah dan aspirasi masyarakat Papua, sehingga memicu berbagai bentuk kekecewaan dan ketidakpuasan. Ketimpangan sosial ekonomi, dimana Papua dikenal sebagai daerah yang memiliki sumber daya alam melimpah. Dalam kenyataannya banyak rakyat Papua yang mati kelaparan, hidup dalam ikatan lingkaran kemiskinan yang akut, miskin, tidak berdaya, sakit, lapar, haus. progres pembangunan daerah yang stagnan, hasil kekayaan alam, tambang seperti emas, perak, tembaga lebih banyak diarahkan untuk kepentingan pusat kekuasaan dan perusahaan multinasional. Rakyat Papua merasa tidak puas dengan pemerintah pusat, selain itu ketimpangan sosial juga yang memicu reaksi tidak percayanya rakyat Papua kepada pemerintah pusat. kualitas sumber daya manusia sangat rendah. Otonomi khusus bagi provinsi Papua pada dasarnya adalah pemberian kewenangan yang lebih luas bagi provinsi dan rakyat Papua untuk mengatur dan mengurus diri sendiri di dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia. kewenangan yang lebih luas berarti tanggung jawab yang lebih besar bagi provinsi dan rakyat Papua untuk menyelenggaraan pemerintahan dan mengatur pemanfaatan sumber daya alam di provinsi Papua untuk sebesar-besarnya bagi kemakmuran rakyat Papua sebagai bagian dari rakyat Indonesia sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Kewenangan ini berarti pula kewenangan untuk memberdayakan potensi sosial-budaya dan perekonomian masyarakat Papua, termasuk memberikan peran yang memadai bagi orang-orang asli Papua melalui para wakil adat, agama dan kaum perempuan.

Tujuan juga diberinnya otonomi khusus bagi Provinsi Papua adalah untuk mengatur dan mengurus rumah tangganya sendiri, namun di satu sisi ada kondisi yang belum berjalan dengan baik, yaitu dengan penghormatan terhadap Hak Asasi Manusia (HAM), yang mana masih kurang serta dalam pengelolaan sumber daya alam yang tidak adil. Dimana pemberian dana otonomi khusus untuk Provinsi Papua sendiri bertujuan untuk Mewujudkan rasa keadilan sebagai bentuk penghormatan terhadap Hak asasi masyarakat asli Papua dalam percepatan pembangunan ekonomi di Papua dalam peningkatan kesejahteraan kemajuan masyarakat Papua dan dalam rangka demi mewujudkannya kesetaraan dan keseimbangan antara Papua dengan daerah lainnya.

Dalam rangka pelaksanaan otonomi khusus yang besaran nilainya setara dengan 2% dua persen dari plafon Dana Alokasi Umum Nasional selama 25 tahun yang di tujukan kepada provinsi Papua, untuk pembiayaan pendidikan dan kesehatan yang ada di Papua serta dana tambahan infrastruktur yang besarnya ditetapkan oleh pemerintah dengan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) yang berdasarkan usulan provinsi pada setiap tahun anggaran itu ditujukan kepada

pembiyayaan pembangunan infrastruktur yang ada di Papua. Berikut merupakan penjelasan mengenai perkembangan penerimaan dana otonomi khusus dan dana tambahan infrastruktur dalam rangka otonomi khusus papua tahun anggaran 2002-2019 sebagai berikut:

Gambar 1.1

Perkembangan penerimaan dana otonomi khusus dan dana tambahan infrastruktur dalam rangka otonomi khusus papua tahun anggaran 2002-2019



1.2 Kesenjangan Masalah yang Diambil (GAP Penelitian)

Di dalam UUD 1945 telah di atur tentang Hak-Hak Asasi Manusia sebagai dasar untuk wajib memberikan pelayanan dan kesejahteraan kepada masyarakat. Misalnya di dalam UUD 1945 pada pasal 27 ayat (2) yang menyatakan bahwa setiap Warga Negara Indonesia berhak mendapatkan pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan Dalam pasal ini memancarkan asas keadilan sosial bagi seluruh rakyat indonesia.

Ada 3 hal yang perlu diperhatikan dalam indeks pembangunan manusia suatu daerah yang dimana adalah tentang:

1. Umur panjang dan hidup yang sehat
2. Pengetahuan
3. Standar hidup layak

Pembangunan Manusia sendiri tidak terlepas dari yang namanya pembangunan fisik, sebagai penunjang dari terciptanya kondisi ketahanan wilayah. Dimana di dalam pembangunan manusia itu sendiri membutuhkan yang anamanya sarana dan prasarana sebagai penunjang dalam menciptakan standar hidup yang layak, pengetahuan yang baik, serta umur panjang dan hidup yang sehat. Ketiga hal ini dalam indeks pembangunan manusia tersebut dapat dipenuhi apabila pembangunan diarahkan pula pada penyediaan fasilitas-fasilitas pendukung yang dapat digunakan

oleh setiap individu masyarakat, sebagai media dalam menciptakan pembentukan kepribadian masyarakat itu sendiri. Kondisi faktual pembangunan manusia tersebut di atas memberikan gambaran bahwa Provinsi Papua merupakan salah satu provinsi di Indonesia yang masih memiliki persoalan yang cukup berat dan menjadi tantangan dan satu sisi menjadi tanggungjawab semua pihak dalam hal penanganannya

Sejak menjadi bagian dari NKRI pada tanggal 1 Mei 1963, pemerintah telah berupaya semaksimal mungkin untuk melaksanakan kegiatan pembangunan di Provinsi Papua. Dalam kurun waktu 56 tahun hingga saat ini, pemerintah telah menerapkan sejumlah kebijakan dan strategi untuk membangun Provinsi Papua, termasuk pemberian Otonomi Khusus (Otsus) yang seluas-luasnya namun belum mampu mensejajarkan Papua dengan provinsi atau daerah lainnya di Indonesia.

Dari tahun 2001 hingga 2021 sudah 20 tahun status otonomi khusus Provinsi di Papua berjalan. Namun kenyataannya menunjukkan bahwa masih banyak masyarakat Papua terutama orang asli Papua yang tingkat kesejahteraan masih rendah baik dilihat dari kesejahteraan ekonomi tingkat pendapatan daya beli, kemampuan daya beli, kesejahteraan sosial berupa kesehatan dan gizi serta pendidikan yang layak. Sebagian besar dari masyarakat asli Papua masih punya pendapatan yang rendah, tidak mendapatkan pendidikan yang memadai, gizi dan serta kesehatan yang rendah, kondisi seperti ini juga tidak hanya terdapat di wilayah pedesaan atau di daerah pedalaman Papua akan tetapi juga kondisi seperti juga bisa terdapat di daerah perkotaan seperti di Kota Jayapura.

Pencapaian pembangunan manusia diukur dengan memperhatikan tiga aspek esensial yaitu umur panjang dan hidup sehat, pengetahuan, dan standar hidup layak. Peningkatan IPM tahun 2021 disebabkan oleh meningkatnya seluruh komponen penyusun IPM kota jayapura pada tahun 2021, setelah kasus covid-19 menurun, geliat ekonomi memulih sehingga menyebabkan IPM Tahun 2021 mengalami peningkatan.

Tabel 1.1
Tabel Indeks Pembangunan Manusia Di Kota Jayapura menurut
komponen Tahun 2010-2021

Tahun	Indeks Pembangunan Manusia	Angka Harapan Hidup	Harapan Lama Sekolah	Rata-Rata Lama Sekolah	Pengeluaran perkapita yang di sesuaikan (ppp)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
2010	76,69	69,89	13,64	10,62	13,903

2011	76,97	69,90	13,77	10,71	13,960
2012	77,25	69,94	13,91	10,80	14,004
2013	77,46	69,95	13,95	10,88	14,088
2014	77,86	69,99	14,06	11,09	14171,94
2015	78,04	69,97	14,16	11,11	14249,43
2016	78,56	69,99	14,61	11,14	14,319
2017	79,23	70	14,98	11,15	14,781
2018	79,58	70,15	14,99	11,30	14,922
2019	79,58	70,38	15,00	11,55	15,176
2020	79,94	70,45	15,01	11,56	14,763
2021	80,11	70,52	15,02	11,57	14,937

(Diolah oleh penulis berdasarkan angka indeks pembangunan manusia kota Jayapura tahun 2010-2021.)

Berdasarkan amanat UU No.21 Tahun 2001 bahwa ada dua tujuan utama yang ingin dicapai melalui penerapan Undang-Undang Otonomi Khusus Provinsi Papua tersebut.

Pertama, Undang-Undang nomor 21 tahun 2001 ini diharapkan dalam menjadi alat legislasi yang ampuh untuk menyelesaikan setiap persoalan mendasar yang di Papua. masalah–masalah serius yang terjadi di Papua juga dapat di kategoris sebagai berikut :

1. Pelanggaran HAM atau pelanggaran hak asasi manusia yang terjadi di Papua ini termasuk di dalamnya pelanggaran terhadap sosial budaya dan hak-hak ekonomi orang asli Papua;
2. Ketimpangan pembangunan antara provinsi Papua dan provinsi lainnya
3. Kemiskinan yang meningkat / bertambah terhadap orang asli Papua.

Kedua, dengan menyelesaikan tiga masalah tersebut di atas secara benar tuntas dan bermartabat, integritas Negara Kesatuan Republik Indonesia di Papua dapat dipertahankan dan diperkuat. Kenyataannya, memang berbagai indikator kesejahteraan masyarakat dan indikator keberhasilan pembangunan di Provinsi Papua menunjukkan gambaran yang cenderung membaik namun masih ada gap dengan daerah lainnya di Indonesia yang cukup besar.

Dalam rangka meningkatkan Indeks Pembangunan Manusia dalam rangka kesejahteraan masyarakat asli Papua di kota Jayapura dapat dilihat dari kenyataan dan kondisi langsung di kota Jayapura dan di indikasikan bahwa kebijakan otonomi khusus bagi Provinsi di Papua belum dapat berjalan dengan baik dan belum sepenuhnya efektif.

Hingga sekarang ini sudah hampir lebih 20 tahun status otonomi khusus bagi Provinsi Papua telah berjalan. Akan tetapi kenyataan menunjukkan bahwa masih banyak masyarakat Papua terutama penduduk asli Papua yang tingkat kesejahteraan mereka masih rendah baik dilihat dari kesejahteraan ekonomi (tingkat pendapatan atau kemampuan daya beli) maupun kesejahteraan sosial (pendidikan, kesehatan dan gizi, dan lain-lain). Sebagian masyarakat asli Papua masih punya pendapatan yang rendah, tidak memiliki pendidikan yang memadai, dan derajat kesehatan dan gizi rendah. Kondisi seperti ini terdapat tidak hanya di wilayah pedesaan atau daerah pedalaman Papua akan tetapi juga di seperti di kota Jayapura itu sendiri, Kenyataan tersebut dapat mengindikasikan bahwa kebijakan otonomi khusus bagi Provinsi di Papua belum sepenuhnya efektif dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat asli Papua.

1.3 Penelitian Terdahulu

Penelitian ini terinspirasi oleh beberapa penelitian terdahulu, mengenai peran pemerintah dalam konteks pemberdayaan petani pala di Kabupaten Fak-Fak maupun konteks pembangunan kampung Werur Distrik Bikar Kabupaten Tambrauw Provinsi Papua Barat. Penelitian Albertus Dogopia yang mengangkat judul mengenai Peranan pemerintah daerah dalam pemberdayaan petani pala di kabupaten fak-fak pada tahun 2017 dimana penelitian pertama sama-sama mengenai peranan pemerintah dan Penelitian Anselmus yappen yang mengangkat judul Pengelolaan dana otonomi khusus dalam Pembangunan Kampung Werur Distrik Bikar Kabupaten Tambrauw Provinsi Papua Barat pada tahun 2019 dimana penelitian kedua sama-sama mengenai dana otonomi khusus. Sehingga dari kedua penelitian terdahulu ini dapat dijadikan acuan bagi peneliti dalam melakukan penelitian yang bisa saja memiliki kesimpulan yang sama atau juga bisa berbeda

1.4 Pernyataan Kebaruan Ilmiah

Dalam penelitian ini, peneliti melakukan penelitian yang berbeda dan belum dilakukan oleh penelitian terdahulu, dimana konteks penelitian yang dilakukan peneliti yakni mengenai mengukur peran pemerintah yang berdasarkan Teori Soekanto (2015:210) meliputi dua hal yaitu mengenai hak dan kewajiban yakni hak yang didalamnya terdapat ketersediaan anggaran, ketersediaan sarana dan prasarana, ketersediaan sumber daya manusia dan kewajiban yang terdiri dari visi dan misi, tupoksi dan wewenang, program dan kegiatan, pengawasan serta penindakan.

1.5 Tujuan

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis peran Pemerintah Daerah dalam meningkatkan Indeks Pembangunan Manusia pasca pemberian dana otonomi khusus di kota Jayapura Provinsi Papua, mengetahui dan menganalisis faktor-faktor pendukung dan penghambat peran Pemerintah Daerah dalam meningkatkan Indeks Pembangunan Manusia pasca pemberian dana otonomi khusus di Kota Jayapura provinsi papua dan mengetahui dan menganalisis upaya mengatasi faktor-faktor penghambat peran Pemerintah Daerah dalam meningkatkan Indeks Pembangunan Manusia pasca pemberian dana otonomi khusus di Kota Jayapura Provinsi Papua

II. METODE

Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif menurut Simangunsong (2016:192) menjelaskan bahwa penelitian kualitatif meyakini bahwa fokus penelitian kualitatif adalah mencari makna dimana dalam penelitian ini menggunakan metode deskriptif dengan pendekatan induktif karena dianggap tepat untuk digunakan dalam pengamatan ini. Hal ini dikarenakan dalam proses penelitian dilaksanakan berdasarkan fakta-fakta yang ada di lapangan mengenai Peran pemerintahan daerah dalam meningkatkan Indeks Pembangunan Manusia dalam menunjang pelaksanaan tugas dan fungsi penyelenggaraan urusan pemerintahan umum. Penulis meneliti fakta-fakta yang ada di lapangan dan kemudian mendeskripsikan atau menggambarkan secara sistematis, aktual dan akurat sehingga berdasarkan fakta-fakta tersebut dapat ditarik kesimpulan yang bersifat umum mengenai peran pemerintahan daerah dalam meningkatkan indeks pembangunan manusia (IPM) dalam menunjang pelaksanaan tugas dan fungsi penyelenggaraan urusan pemerintahan umum. Selain itu, teknik pengumpulan data yang digunakan yaitu wawancara dan observasi. Dalam penelitian ini penulis melakukan wawancara yang mendalam dengan 14 orang informan yang terdiri dari Walikota, DPRD, Majelis Rakyat Papua (MRP), Sekertaris Daerah, Asisten Daerah 1, Asisten Daerah 2, Asisten Daerah 3, Kepala Dinas Pendidikan, Kepala Dinas Kesehatan, Kepala BPSDM Kota Jayapura, Kepala Bidang BPSDM, Kepala BAPPEDA, Kepala Badan Pusat Statistik, Kepala Bagian Tata Pemerintahan.

Peneliti melakukan wawancara dan observasi serta melihat dokumen yang ada. Adapun teori yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan Teori Soekanto (2015:210) meliputi dua hal yaitu mengenai hak dan kewajiban.

III. HASIL DAN PEMBAHASAN

Penulis menganalisis peran pemerintah daerah dalam meningkatkan indeks pembangunan manusia paska pemberian dana otonomi khusus di Kota Jayapura Provinsi Papua sebagai berikut dimana berdasarkan hasil wawancara menunjukkan bahwa kewenangan khusus yang diterima oleh pemerintah Kota Jayapura dan tujuan pemberian dana otonomi khusus yakni dalam rangka meningkatkan indeks pembangunan manusia di Kota Jayapura, tampaknya belum tercapai secara optimal selain itu para pejabat sebagai pemegang kewenangan khusus belum memanfaatkannya secara cerdas dan optimal disetiap jenjang struktur pemerintahan sehingga menghambat pencapaian peningkatan indeks pembangunan manusia Kota Jayapura itu sendiri. Walaupun demikian, tidak dapat dipungkiri bahwa otonomi khusus yang telah diimplementasikan selama kurang lebih 20 tahun setidaknya telah memberikan dampak positif bagi perkembangan masyarakat papua baik sektor pendidikan, kesehatan, pembangunan ekonomi. Dengan dana otonomi khusus sendiri telah berhasil membuka lapangan kerja sehingga mengurangi pengangguran. Demikian halnya dengan sarana dan prasarana jalan dan transportasi yang tidak dapat di biayai melalui APBD, sekarang telah sedikit demi sedikit teratasi dengan adanya otonomi khusus. Dimana penelitian yang telah diolah oleh peneliti dari bahan atau data mentah dengan menggunakan Teknik analisis data. Peneliti selanjutnya menganalisis data berdasarkan hasil wawancara yang diolah yang kemudian dijadikan satu kesatuan data dan fakta secara utuh. Data dan fakta yang telah diolah kemudian dijadikan hasil penelitian secara langsung oleh peneliti yang terjadi di lapangan dengan berpegangan pada pedoman teori yang digunakan peneliti. Penyajian hasil dari penelitian yang kemudian akan dipaparkan dalam bentuk deskriptif berupa uraian dan kutipan langsung dari narasumber. Peneliti melanjutkan kajian terhadap Peran Pemerintah Daerah Dalam Meningkatkan Indeks Pembangunan Manusia Paska Pemberian Dana Otonomi Khusus Di Kota Jayapura Provinsi Papua dengan berdasar pada teori “Soekanto,2015:2010” Teori tersebut menetapkan 2 sub tema dalam peran pemerintah yang kemudian peneliti kaitkan dengan pelaksanaan peran pemerintah di wilayah kota jayapura.

3.1 Peran Pemerintah Daerah Dalam Meningkatkan Indeks Pembangunan Manusia Pasca Pemberian Dana Otonomi Khusus Di Kota Jayapura Provinsi Papua

Pembangunan manusia di Papua secara umum terus menunjukkan peningkatan meskipun belum mampu mengangkat Kota Jayapura keluar dari dari kategori “rendah” dalam status pembangunan

manusianya. Belum mempunyai IPM Papua menembus kategori “sedang” bisa disebabkan peningkatan dimensi-dimensinya yang belum optimal. Lambatnya peningkatan dimensi IPM akan terakumulasi pada peningkatan nilai IPM. Semakin rendah kecepatan peningkatan IPM maka semakin lama waktu yang dibutuhkan untuk mencapai nilai IPM yang ideal (100). Kecepatan suatu daerah dalam mencapai IPM ideal ditunjukkan oleh nilai pertumbuhan IPM. Konsep pertumbuhan IPM berpegang pada semakin besar nilai IPM dengan besar perubahan yang sama maka akan menghasilkan pertumbuhan yang semakin kecil. Pencapaian pembangunan manusia diukur dengan memperhatikan tiga aspek esensial yaitu umur panjang dan sehat, pengetahuan, dan standar hidup layak.

1. Adapun Upaya yang dilakukan pemerintah Kota Jayapura dalam meningkatkan IPM
Memperbaiki sarana kesehatan dan mendorong masyarakat untuk selalu mengkonsumsi makanan bergizi.
2. Pembangunan sekolah unggulan di daerah kota sampai-pedalaman, dan memperbarui sistem pendidikan
3. Mendorong dan memotivasi masyarakat agar terus berusaha, dengan membuka usaha. Dengan hal itu kesejahteraan juga akan bertambah.

3.1.1 Hak

3.1.1.1 Ketersediaan Anggaran

Ketersediaan anggaran telah ada dan telah diatur dengan baik dalam aturan yang berlaku yang bertujuan juga dalam menunjang peran pemerintah Kota Jayapura dalam meningkatkan indeks pembangunan manusia pada beberapa indikator yang mempengaruhi ipm kota jayapura. Serta penulis dapat memberikan saran yang mana pemerintah kota jayapura harus lebih ekstra dalam merencanakan, atau adanya perencanaan dan koordinasi yang baik sehingga dapat memberikan dampak positif dalam peningkatan indeks pembangunan manusia di kota jayapura itu sendiri.

3.1.1.2 Ketersediaan Saran dan Prasarana

Dengan ketersediaan sarana dan prasarana yang ada boleh dapat disimpulkan: bahwa sarana dan prasarana menjadi salah satu faktor penting dalam menunjang pelayanan kepada masyarakat di segala aspek kehidupan, sarana dan prasarana di kota jayapura telah meningkat dengan baik dan memadai dari tahun ke tahun. Selain itu peneliti dapat memberikan saran dalam meningkatkan

indeks pembangunan manusia dalam mencapai target 100% membutuhkan kinerja dari pemerintah yang diharapkan lebih bersemangat dalam memberikan pelayanan, waktu, dan tenaga lebih ekstra untuk menciptakan kesejahteraan masyarakat sehingga indeks pembangunan manusia di Kota Jayapura boleh terus meningkat.

3.1.1.3 Ketersediaan Sumber Daya Manusia

hasil wawancara dan analisis yang telah dilakukan, peneliti menyimpulkan bahwa ketersediaan anggaran telah ada dan telah diatur dengan baik dalam aturan yang berlaku yang bertujuan juga dalam menunjang peran pemerintah Kota Jayapura dalam meningkatkan indeks pembangunan manusia pada beberapa indikator yang mempengaruhi ipm kota jayapura .selain itu, penulis dapat memberikan saran yang mana pemerintah kota jayapura harus lebih ekstra dalam merencanakan, atau adanya perencanaan dan koordinasi yang baik sehingga dapat memberikan dampak positif dalam peningkatan indeks pembangunan manusia di kota jayapura itu sendiri.

3.1.2 Kewajiban

3.1.2.1 Visi dan Misi

visi dan misi sendiri tidak dapat dipungkiri menjadi alasan utama dari dibentuknya suatu lembaga, Misi sendiri pada umumnya adalah serangkaian hal yang dilakukan untuk mencapai sebuah visi peneliti menyimpulkan bahwa visi dan misi dari Bappeda selaku badan perencanaan pembangunan daerah , dinas pendidikan, dinas kesehatan dan visi misi dari tata pemerintahan Kota Jayapura sudah sesuai dengan apa yang diharapkan. Serta, peneliti dapat memberikan saran: Sebaiknya peran pemerintah daerah Kota Jayapura lebih memperhatikan hal-hal kecil yang sekiranya dapat menyebabkan suatu hal yang kurang baik dan tidak sesuai dengan misi visi yang sudah ada.

3.1.2.2 Tupoksi dan Wewenang

peneliti menyimpulkan dengan ini peneliti menyimpulkan bahwa tupoksi dan wewenang merupakan suatu hal yang wajib dan sudah menjadi suatu kebiasaan yang dilakukan oleh aparatur sipil negara sesuai dengan jabatan dan fungsi yang di emban. Selain itu, peneliti dapat memberikan saran dengan ini peneliti menyarankan untuk semua tugas pokok dan fungsi dapat diawasi dengan baik agar semua sesuai dengan apa yang diharapkan.

3.1.2.3 Program dan Kegiatan

peneliti menyimpulkan program yang dilakukan oleh pemerintah kota Jayapura dalam rangka meningkatkan indeks pembangunan manusia sejauh ini dapat dikatakan telah berjalan dengan baik dengan dilihat dari beberapa program pemerintah yang telah dilakukan. Selain itu, Penelitian telah dilakukan, dan peneliti dapat memberikan saran: dalam mencapai angka 100% indeks pembangunan manusia, pemerintah kota Jayapura diharapkan lebih banyak memberikan atau mengadakan program-program pemerintah yang dapat menunjang setiap sektor seperti contoh memberikan dan menambahkan kuota beasiswa anak-anak papua untuk bersekolah di luar papua seperti di universitas ternama yang ada di indonesia dan yang telah ada selama ini program beasiswa ke luar negeri seperti ke Amerika dan Kanada.

3.1.2.4 Pengawasan

Peneliti menyimpulkan bahwa pengawasan yang dilakukan dalam penyelenggaraan pemerintahan dalam segala aspek telah berjalan dengan baik dan telah sesuai dengan Standar operasional prosedur (SOP) yang telah ditetapkan dan berlaku di pemerintah kota Jayapura. Selain itu, Peneliti dapat memberikan saran: demi mencegah hal-hal yang tidak diinginkan pada saat penyelenggaraan pemerintah berlangsung, pemerintah di harapkan dapat menjalankan tupoksi dan wewenang sesuai dengan SOP yang sudah beraku, dan juga selalu di harapkan agar dapat menjalankan tugas dan tanggungjawab nya dengan baik berdasarkan aturan-aturan yang ada..

3.1.2.5 Penindakan

Peneliti menyimpulkan penindakan sangatlah penting dalam jalannya suatu pelaksanaan penyelenggara pemerintahan yang dimana apabila jika ada oknum pemerintahan dalam menjalankan tugas dan tanggung jawab tidak sesuai dan melanggar aturan maka akan dijatuhi sanksi atau di jatuhi hukuman yang berlaku sesuai aturan yang ada.

Selain itu, Peneliti dapat memberikan saran: demi menghasilkan penyelenggaraan pemerintahan yang baik diharapkan jika ada oknum pemerintah yang melanggar maka harus dijatuhi hukuman yang sudah ada dan yang telah ditetapkan di dalam peraturan tersebut

3.2 Faktor Pendukung dan Penghambat Peran Pemerintah Daerah dalam meningkatkan Indeks Pembangunan Manusia paska pemberian Otonomi Khusus di Kota Jayapura Provinsi Papua

3.2.1 Faktor Pendukung

3.2.1.1 Anggaran

Anggaran merupakan rencana tertulis mengenai kegiatan suatu organisasi yang dinyatakan secara kuantitatif untuk jangka waktu tertentu dan dinyatakan dalam satuan uang, tetapi dapat juga dinyatakan dalam satuan barang/jasa. jika dikaitkan dengan tugas dan pokok badan perencanaan pembangunan daerah bappeda kota jayapura anggaran sangatlah penting dalam menunjang setiap akses, tugas dan tanggung jawab dalam meningkatkan kualitas sumber daya manusia (sdm) perencana pembangunan untuk menghasilkan kinerja yang profesional perencanaan pembangunan daerah dan sebagainya dalam visi dan misi yang berlaku pada badan perencanaan pembagunan kota jayapura tersebut.

Tabel 3.1

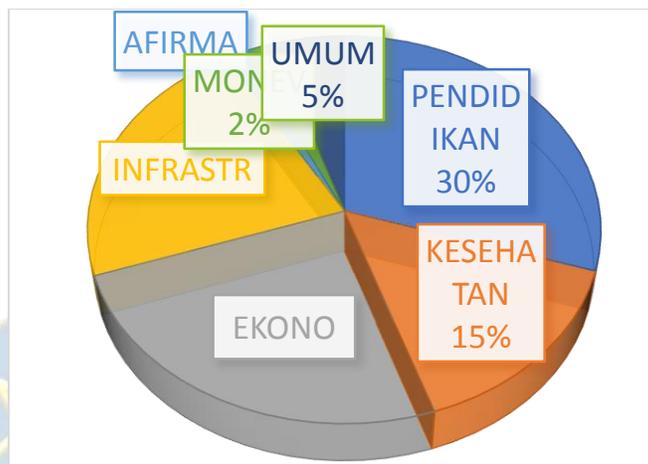
ANGGARAN
PENDIDIKAN = Rp. 9.560.106.330,-
KESEHATAN = Rp. 4.780.053.000,-
INFRASTRUKTUR= Rp. 6.936.889.485,-
EKONOMI = Rp. 7.966.755.100,-
AFFRMASI = Rp. 448.536.000,-
MONEV = Rp. 637.340.000,-
UMUM DAN LAINNYA = Rp. 1.537.340.400,-

Berdasarkan tabel diatas menunjukkan bahwa pembagian anggaran di setiap bidang telah sesuai dengan tupoksi dan keperluan dari setiap bidang dan telah sesuai dengan peraturan daerah yang berlaku.

3.2.1.2 Regulasi Otonomi Khusus

Sesuai dengan Undang-Undang 21 Tahun 2001 mengenai pemberian dana otonomi khusus papua , untuk Kota Jayapura sendiri sebagai berikut

Gambar 3.1



Berdasarkan tabel diatas menunjukkan bahwa pembagian anggaran di setiap bidang telah sesuai dengan tupoksi dan keperluan dari setiap bidang dan telah sesuai dengan peraturan daerah yang berlaku. Dan Dalam pelaksanaan penyelenggaraan, pelaksanaan dana otonomi khusus di setiap bidang yang ada kota jayapura. Telah Sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku

3.2.2 Faktor Penghambat

3.2.2.1 Sarana Dan Prasarana

1. Kesehatan: masih banyaknya masyarakat yang selalu mengonsumsi makanan yang kurang bergizi.
Pembangunan kesehatan di kota jayapura sangat penting sebagian dalam pembangunan kota jayapura yang lebih baik, upaya ini perlu di lakukan secara terus menerus tanpa ada yang tertinggal faktor utama yang harus di perhatikan ketersediaan layanan dan tantangan social budaya hal ini ditujukan untuk merumuskan strategi untuk meningkatkan pelayanan kesehatan yang berbasis kondisi social yang ada di kota jayapura
2. Pendidikan
Peneliti menyimpulkan bahwa sarana dan prasarana yang telah di siapkan oleh pemerintah daerah sendiri khususnya di setiap bidang yang ada saat telah memenuhi standar dalam pelayanan kepada masyarakat. Selain itu, peneliti dapat memberikan saran pemerintah di harapkan selalu melakukan sosialisasi dan bekerja keras dalam memberikan dan menjaga sarana dan prasarana yang sudah ada agar tetap terjaga dengan baik.

3.3 Upaya mengatasi faktor-faktor penghambat peran pemerintah daerah dalam meningkatkan Indeks Pembangunan Manusia paska pemberian Otonomi Khusus di Kota Jayapura Provinsi Papua

3.3.1 Membangun Sarana Dan Prasarana

berdasarkan upaya langsung yang dilakukan oleh pemerintah kota jayapura saat ini telah berjalan dengan baik dan telah berjalan sesuai aturan yang berlaku dengan menyediakan sarana dan prasarana yang telah memadai selain itu, adapun saran yang diharapkan dalam upaya mengatasi faktor penghambat yang ada di Kota Jayapura yaitu dibutuhkan peran pemerintah yang lebih ekstra dalam mengupayakan penyediaan lapangan pekerjaan bagi masyarakat.

3.3.2 Motivasi

Melalui penelitian ini peneliti menyimpulkan apa yang dilakukan pemerintah dalam memotifasi masyarakat telah berjalan dengan baik. serta diharapkan agar pemerintah kota jayapura dalam pelayanannya kepada masyarakat selalu boleh memberikan motifasi kepada masyarakat agar dapat bersemangat dalam bekerja dan melakukan tugas dan tanggung jawab yang telah di embannya.

3.3.3 Upaya tidak langsung

3.3.3.1 Regulasi

Upaya tidak langsung pemerintah Kota Jayapura ini adalah mengenai regulasi atau aturan-aturan yang berlaku di pemerintahan setempat berupa undang-undang dan peraturan-peraturan daerah yang ada dan di kota jayapura. Dan Untuk menjalankan penyelenggaraan urusan pemerintahan di kota jayapura. Sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku yakni :

1. Undang-Undang Dasar 1945 Pada Pasal 18 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 bagian Pemerintah Daerah, Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan DPRD menurut asas otonomi daerah dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi yang seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia.
2. Undang-undang 23 tahun 2014 tentang pemerintahan daerah sebagai satu kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai otonomi berwenang mengatur dan mengurus daerahnya sesuai aspirasi dan kepentingan masyarakatnya sepanjang tidak

bertentangan dengan tatanan hukum nasional dan kepentingan umum. Dalam rangka memberikan ruang yang lebih luas kepada daerah untuk mengatur dan mengurus kehidupan warganya maka Pemerintah Pusat dalam membentuk kebijakan harus memperhatikan kearifan lokal dan sebaliknya daerah ketika membentuk kebijakan daerah baik dalam bentuk Perda maupun kebijakan lainnya hendaknya juga memperhatikan kepentingan nasional. Dengan demikian akan tercipta keseimbangan antara kepentingan nasional yang sinergis dan tetap memperhatikan kondisi, kekhasan, dan kearifan lokal dalam penyelenggaraan pemerintahan secara keseluruhan.

3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2001 tentang pemberian dana otonomi khusus Otonomi Khusus bagi Provinsi Papua pada dasarnya adalah pemberian kewenangan yang lebih luas bagi Provinsi dan rakyat Papua untuk mengatur dan mengurus diri sendiri di dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia. Kewenangan yang lebih luas berarti pula tanggung jawab yang lebih besar bagi Provinsi dan rakyat Papua untuk menyelenggarakan pemerintahan dan mengatur pemanfaatan kekayaan alam di Provinsi Papua untuk sebesar-besarnya bagi kemakmuran rakyat Papua sebagai bagian dari rakyat Indonesia sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Kewenangan ini berarti pula kewenangan untuk memberdayakan potensi sosial-budaya dan perekonomian masyarakat Papua, termasuk memberikan peran yang memadai bagi orang-orang asli Papua melalui para wakil adat, agama, dan kaum perempuan. Peran yang dilakukan adalah ikut serta merumuskan kebijakan daerah, menentukan strategi pembangunan dengan tetap menghargai kesetaraan dan keragaman kehidupan masyarakat Papua, melestarikan budaya serta lingkungan alam Papua, yang tercermin melalui perubahan nama Irian Jaya menjadi Papua, lambang daerah dalam bentuk bendera daerah dan lagu daerah sebagai bentuk aktualisasi jati diri rakyat Papua dan pengakuan terhadap eksistensi hak ulayat, adat, masyarakat adat, dan hukum adat.

3.3.3.2 Dukungan Anggaran

Upaya yang dilakukan pemerintah daerah dalam meningkatkan indeks pembangunan manusia ke setiap sektor yang dimaksud sector pendidikan, kesehatan dan pembangunan ekonomi ini adalah dengan cara memberikan dukungan anggaran kepada setiap sector yang ada.

3.4 Diskusi Temuan Utama Penelitian

Dalam penelitian ini, berdasarkan Teori Soekanto yaitu mengenai hak dan kewajiban terinspirasi oleh beberapa penelitian terdahulu, mengenai peran pemerintah dalam konteks pemberdayaan petani pala di Kabupaten Fak-Fak maupun konteks pembangunan kampung Werur Distrik Bikar Kabupaten Tambrauw Provinsi Papua Barat. Penelitian Albertus Dogopia (2017) yang mengangkat judul mengenai Peranan pemerintah daerah dalam pemberdayaan petani pala di kabupaten fak-fak pada tahun 2017 dimana penelitian pertama sama-sama mengenai peranan pemerintah dan Penelitian Anselmus yappen (2019) yang mengangkat judul Pengelolaan dana otonomi khusus dalam Pembangunan Kampung Werur Distrik Bikar Kabupaten Tambrauw Provinsi Papua Barat pada tahun 2019 dimana penelitian kedua sama-sama mengenai dana otonomi khusus. Sehingga dari kedua penelitian terdahulu ini dapat dijadikan acuan bagi peneliti dalam melakukan penelitian yang bisa saja memiliki kesimpulan yang sama atau juga bisa berbeda

3.5 Diskusi Temuan Menarik Lainnya

Penulis menemukan bahwa dalam mengatasi faktor penghambat peran pemerintah daerah dalam meningkatkan indeks pembangunan manusia paska pemberian dana otonomi khusus di Kota Jayapura Provinsi Papua yaitu dibutuhkan peran pemerintah yang lebih ekstra dalam mengupayakan penyediaan lapangan pekerjaan bagi masyarakat, pemerintah kota jayapura dalam pelayanannya kepada masyarakat selalu boleh memberikan motivasi kepada masyarakat agar dapat bersemangat dalam bekerja dan melakukan tugas dan tanggung jawab yang telah di embannya serta pemerintah Kota Jayapura dapat berinovasi dalam menyediakan lapangan pekerjaan dan memberikan pelatihan-pelatihan khusus dalam rangka meningkatkan sumber daya manusia masyarakat Kota Jayapura.

IV. KESIMPULAN

Peneliti menyimpulkan dalam penelitian ini yaitu:

Adapun hak:

- bahwa ketersediaan anggaran telah ada dan telah diatur dengan baik dalam pengawasan anggaran. yang bertujuan dalam menunjang peran pemerintah daerah Kota Jayapura dalam meningkatkan indeks pembangunan manusia pada beberapa indikator yang mempengaruhi Ipm Kota Jayapura.
- ketersediaan sarana dan prasarana yang ada boleh dapat disimpulkan bahwa sarana dan prasarana menjadi salah satu faktor penting dalam menunjang pelayanan kepada masyarakat di segala aspek kehidupan, sarana dan prasarana di Kota Jayapura telah meningkat dengan baik dan memadai dari tahun ke tahun.
- Sumberdaya manusia sudah mampu menggunakan sarana dan prasana di kota jayapura dan telah banyak meningkat dari bebepa tahun terakhir dan ini sangat baik untuk dilihat perkembangannya.

Adapun kewajiban:

- visi dan misi dari Bappeda selaku badan perencanaan pembangunan daerah, dinas pendidikan, dinas kesehatan dan visi misi dari tata pemerintahan Kota Jayapura sudah sesuai dengan apa yang diharapkan.
- program yang dilakukan oleh pemerintah Kota Jayapura dalam rangka meningkatkan indeks pembangunan manusia sejauh ini dapat dikatakan telah berjalan dengan baik dengan dilihat dari beberapa program pemerintah yang telah dilakukan.
- bahwa pengawasan yang dilakukan dalam penyelenggaraan pemerintahan dalam segala aspek telah berjalan dengan baik dan telah sesuai dengan Standar operasional prosedur (SOP) yang telah ditetapkan dan berlaku di pemerintah kota jayapura
- Penindakan sangatlah penting dalam jalannya suatu pelaksanaan penyelenggara pemerintahan yang dimana apabila jika ada oknum pemerintha dalam menjalankan tugas dan tanggung jawab tidak sesuai dan melanggar aturan maka akan dijatuhi sanksi atau di jatuhi hukuman yang berlaku sesuai aturan yang ada.
- Faktor pendukung
 - pembagian anggaran di setiap bidang telah sesuai dengan tupoksi dan keperluan dari setiap bidang dan telah sesuai dengan peraturan daerah yang berlaku.
 - Aturan yang sudah berlaku di setiap bidang telah sesuai dengan tupoksi dan keperluan dari setiap bidang dan telah sesuai dengan peraturan daerah yang berlaku.

- Faktor penghambat
 - bahwa sarana dan prasarana yang telah di siapkan oleh pemerintah daerah sendiri khususnya disetiap bidang yang ada saat telah memenuhi standar dalam pelayanan kepda masyarakat.
 - faktor social yang mempengaruhi indeks pembangunan manusia di Kota Jayapura sejauh telah berjalan dengan baik, dapat dilihat dari penyediaan lapangan pekerjaan yang telah dibuat oleh pemerintah Kota Jayapura.
- Upaya mengatasi faktor-faktor penghambat
 - Membangun Sarana Dan Prasarana, berdasarkan upaya langsung yang dilakukan oleh pemerintah kota jayapura saat ini telah berjalan dengan baik dan telah berjalan sesuai aturan yang berlaku dengan menyediakan sarana dan prasarana yang telah memadai
 - Motivasi, apa yang dilakukan pemerintah dalam memotifasi masyarakat agar dapat menjalankan aktifitas sehari-hari menuju kearah yang sejahtera telah berjalan dengan baik.
- Upaya tidak langsung
 - Regulasi, undang-undang dan peraturan-peraturan daerah yang ada dan di kota jayapura telah berjalan dengan baik dalam pelaksanaan proses penyelenggaraan pemerintah terkhususnya untuk peran pemerrintah dalam meningkatkan indeks pembangunan manusia di kota jayapura.
 - Dukungan anggaran di setiap bidang telah sesuai dengan tupoksi dan keperluan dari setiap bidang dan telah sesuai dengan peraturan daerah yang berlaku.

Keterbatasan Penelitian: Penelitian ini memiliki keterbatasan utama yakni waktu penelitian, dimana dalam waktu yang diberikan terbilang singkat namun peneliti dapat melakukan penelitian di wilayah pemerintahan Kota Jayapura yaitu bertempat di Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda Kota Jayapura) walaupun tentunya masih terdapat kekurangan dalam penelitian ini peneliti menggunakan teori teori Soekanto (2015:210) meliputi dua hal yaitu mengenai hak dan kewajiban yakni hak yang didalamnya terdapat ketersediaan anggaran, ketersediaan sarana dan prasarana, ketersediaan sumber daya manusia dan kewajiban yang terdiri dari visi dan misi, tupoksi dan wewenang, program dan kegiatan, pengawasan serta penindakan.

Arah Masa Depan Penelitian (*Future work*):

Peneliti menyadari masih awalnya temuan penelitian, oleh karena itu peneliti menyarankan melalui peran pemerintah daerah dalam meningkatkan indeks pembangunan manusia paska pemberian dana otonomi khusus di kota jayapura provinsi papua yaitu melalui hak sebagai berikut

- 1) ketersediaan anggaran dimana pemerintah kota jayapura harus lebih ekstra dalam merencanakan, atau adanya perencanaan dan koordinasi yang baik sehingga dapat memberikan dampak positif dalam peningkatan indeks pembangunan manusia di kota jayapura itu sendiri.
- 2) Ketersediaan sarana dan prasarana dalam meningkatkan indeks pembangunan manusia dalam mencapai target 100% membutuhkan kinerja dari pemerintah yang diharapkan lebih bersemangat dalam memberikan pelayanan, waktu, dan tenaga lebih ekstra untuk menciptakan kedejahteraan masyarakat sehingga indeks pembangunan manusia di Kota Jayapura boleh terus meningkat.
- 3) ketersediaan sumber daya manusia dimana pemerintah Kota Jayapura diharapkan dapat mengelola sumberdaya manusia yang di Kota Jayapura lebih baik lagi sehingga sumber daya manusianya dapat bersaing.

Melalui kewajiban sebagai berikut

- 1) visi dan misi yaitu dimana sebaiknya peran pemerintah daerah Kota Jayapura lebih memperhatikan hal hal kecil yang sekiranya dapat menyebabkan suatu hal yang kurang baik dan tidak sesuai dengan misi visi yang sudah ada.
- 2) tupoksi dan wewenang dimana engan ini penulis menyarankan untuk semua tugas pokok dan fungsi dapat diawasi dengan baik agar semua sesuai dengan apa yang diharapkan.
- 3) program dan kegiatan yaitu dalam mencapai angka 100% indeks pembangunan manusia , pemerintah Kota Jayapura diharapkan lebih banyak memberikan atau mengadakan program-program pemerintah yang dapat menunjang setiap sektor seperti contoh memberikan dan menambahkan kuota beasiswa anak-anak papua untuk bersekolah di luar papua seperti di universitas ternama yang ada di indonesia dan yang telah ada selama ini program beasiswa ke luar negeri seperti ke Amerika dan Kanada.
- 4) Pengawasan dimana demi mencegah hal-hal yang tidak di inginkan pada saat penyelenggaraan pemerintah berlangsung, pemerintah di harapkan dapat menjalankan tupoksi dan wewenang sesuai dengan SOP yang sudah beraku, dan juga selalu di harapkan

agar dapat menjalankan tugas dan tanggungjawab nya dengan baik berdasarkan aturan-aturan yang sudah ada.

- 5) Penindakan yaitu demi menghasilkan penyelenggaraan pemerintahan yang baik diharapkan jika ada oknum pemerintah yang melanggar maka harus dijatuhi hukuman yang sudah ada dan yang telah ditetapkan di dalam peraturan tersebut.

faktor-faktor pendukung dan penghambat peran pemerintah daerah dalam meningkatkan indeks pembangunan manusia paska pemberian dana otonomi khusus di kota jayapura provinsi papua.

Faktor pendukung yaitu :

- Anggaran yang mana pemerintah kota jayapura harus lebih ekstra dalam merencanakan, atau adanya perencanaan dan koordinasi yang baik sehingga dapat memberikan dampak positif dalam peningkatan indeks pembangunan manusia di kota jayapura itu sendiri.
- Regulasi otonomi khusus yaitu Pemerintah daerah harus dapat tetap mengawasi Pengaturan, perencanaan dan pelaporan anggaran setiap bidang dengan baik dan benar.

Faktor penghambat

- Diharapkan dalam upaya mengatasi faktor penghambat yang ada di kota jayapura dibutuhkan peran pemerintah yang lebih ekstra dalam mengupayakan penyediaan lapangan pekerjaan bagi masyarakat.
- Diharapkan agar pemerintah kota jayapura dalam pelayanannya kepada masyarakat selalu boleh memberikan motivasi kepada masyarakat agar dapat bersemangat dalam bekerja dan melakukan tugas dan tanggung jawab yang telah di embannya.

Upaya mengatasi faktor penghambat peran pemerintah daerah dalam meningkatkan indeks pembangunan manusia paska pemberian dana otonomi khusus di Kota Jayapura Provinsi Papua.

- Diharapkan dalam upaya mengatasi faktor penghambat yang ada di kota jayapura dibutuhkan peran pemerintah yang lebih ekstra dalam mengupayakan penyediaan lapangan pekerjaan bagi masyarakat.
- Diharapkan agar pemerintah kota jayapura dalam pelayanannya kepada masyarakat selalu boleh memberikan motivasi kepada masyarakat agar dapat bersemangat dalam bekerja dan melakukan tugas dan tanggung jawab yang telah di embannya

Upaya langsung

1. Sarana dan prasarana, diharapkan dalam upaya mengatasi faktor penghambat yang ada di kota jayapura dibutuhkan peran pemerintah yang lebih ekstra dalam mengupayakan penyediaan lapangan pekerjaan bagi masyarakat.
2. Peran pemerintah Kota Jayapura agar selalu dapat berinovasi dalam menyediakan lapangan pekerjaan dan memberikan pelatihan-pelatihan khusus dalam rangka meningkatkan sumber daya manusia masyarakat Kota Jayapura.

Upaya tidak langsung

1. Regulasi, dalam pelaksanaan penyelenggaraan dana otonomi khusus di setiap bidang yang ada kota jayapura telah Sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
2. Anggaran, pembagian anggaran di setiap bidang telah sesuai dengan tupoksi dan keperluan dari setiap bidang dan telah sesuai dengan peraturan daerah yang berlaku.

V. UCAPAN TERIMA KASIH

Ucapan terima kasih terutama ditujukan kepada Pemerintah Kota Jayapura, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda Kota Jayapura) dan Institut Pemerintahan Dalam Negeri beserta jajaran yang telah memberikan kesempatan kepada penulis untuk melaksanakan penelitian, serta seluruh pihak yang telah memberikan kesempatan penulis untuk melaksanakan penelitian, serta seluruh pihak yang membantu dan mensukseskan pelaksanaan penelitian.

VI. DAFTAR PUSTAKA

Albertus Dogopia,(2017) yang mengangkat judul mengenai Peranan pemerintah daerah dalam pemberdayaan petani pala di kabupaten fak-fak pada tahun 2017.

Anselmus yappen (2019) yang mengangkat judul Pengelolaan dana otonomi khusus dalam Pembangunan Kampung Werur Distrik Bikar Kabupaten Tambrau Provinsi Papua Barat pada tahun 2019

<http://download.garuda.ristekdikti.go.id/article.php?article=1639031&val=14157&title=ANALISA%20PEMBANGUNAN%20MANUSIA%20DAN%20PENGARUHNYA%20TERHADAP%20KESEJAHTERAAN%20MASYARAKAT%20DI%20PROVINSI%20PAPUA>

<https://bpkad.papua.go.id/dana-otsus/18/penerimaan-dalam-rangka-pelaksanaan-otonomi-khusus-bagi-provinsi-papua.htm>

Soekamto, S. (2015). *Sosiologi Suatu Pengantar*. Jakarta: Rajawali Pers.

Suharto Edi, 2005, Analisis Kebijakan Publik (Panduan Pratik Mengkaji Masalah dan Kebijakan Sosial). ALFABETA, Bandung.

Sumaryadi, I. N. (2006). *Otonomi Daerah Khusus dan Birokrasi Pemerintahan*. Jakarta: Lembaga Pengkajian Manajemen Pemerintahan Indonesia .

Suparmoko. 2002. Ekonomi Publik. Yogyakarta: ANDI.

Suud, Mohammad, 2006, 3 Orientasi Kesejahteraan Sosial. Prestasi

Pustaka. Tjiong, R, 1987, Problema Ethis Upaya Kesehatan, "Suatu Tinjauan Kritis", Jakarta: Gramedia

Undang-Undang Republik Indoneisa Nomor 21 Tahun 2001 tentang Pemberian Dana Otonomi Khusus

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah

Widarta, 2001, Cara Mudah Memahami Otonomi Daerah. Jakarta : Larela Pustaka Utama.

